

**PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
DALAM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS
KOPERASI SAWIT BULUH SEJAHTERA DI DESA PATAI,
KECAMATAN CEMPAGA**

YOVY HILMAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dalam skema Perhutanan Sosial: Studi Kasus Koperasi Buluh Sejahtera Di Desa Patai, Kecamatan Cempaga” Adalah benar karya saya dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir Skripsi.

Saya melimpahkan hak cipta karya tulis saya kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Palangka Raya, 18 Juni 2026

Yovy Hilman
NIM. 22.61.025478

ABSTRAK

Program Perhutanan Sosial memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari melalui berbagai skema, salah satunya Hutan Kemasyarakatan (HKm). Di Desa Patai, pengelolaan HKm dilakukan oleh Koperasi Sawit Buluh Sejahtera sebagai pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas ± 818 hektare. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan HKm berdasarkan aspek kelembagaan, pengelolaan kawasan, partisipasi anggota, pengembangan usaha, serta monitoring dan evaluasi, serta mengidentifikasi permasalahan, potensi, dan peluang pengembangannya.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner dengan informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta didukung analisis SWOT sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan HKm telah berjalan sesuai fungsi kelembagaan, namun belum optimal. Kegiatan pengelolaan kawasan, partisipasi anggota, pengembangan usaha, serta monitoring dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Disisi lain, koperasi memiliki potensi yang cukup besar melalui dukungan legalitas, luas kawasan, serta kebijakan Perhutanan Sosial. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota, dan pengembangan usaha berbasis potensi kawasan diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan HKm serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: CBNRM, Hutan Kemasyarakatan, Koperasi, Perhutanan Sosial, Pengelolaan hutan.

ABSTRACT

The Social Forestry Program provides legal access for communities to manage forest areas sustainably through various schemes, one of which is Community Forest (HKm). In Patai Village, the management of HKm is carried out by the Buluh Sejahtera Palm Cooperative as the holder of the Community Forest Utilization Business License (IUPHKm) covering an area of approximately 818 hectares. This study aims to analyze the management of HKm based on institutional aspects, area management, member participation, business development, as well as monitoring and evaluation, and to identify problems, potentials, and development opportunities.

The study uses a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observation, document studies, and questionnaires with informants selected purposively. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and supported by a simple SWOT analysis.

Research results indicate that the management of Community Forestry (HKm) has been carried out in accordance with institutional functions, but it is not yet optimal. Activities in area management, member participation, business development, as well as monitoring and evaluation still need to be improved. On the other hand, cooperatives have significant potential through legal support, the extent of the area, and Social Forestry policies. Strengthening institutions, enhancing member capacity, and business development based on area potential are required to support the sustainability of HKm management and to improve community welfare.

Keywords: CBNRM, Community Forestry, Cooperatives, Social Forestry, Forest management.

**PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
DALAM SKEMA PERHUTANAN SOSIAL: STUDI
KASUS KOPERASI SAWIT BULUH SEJAHTERA DI
DESA PATAI, KECAMATAN CEMPAGA**

**YOVY HILMAN
22.61.025478**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada
Program Studi Kehutanan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam
Skema Perhutanan Sosial: studi kasus Koperasi Sawit
Buluh Sejahtera di Desa Patai, Kecamatan Cempaga
Nama : Yovy Hilman
NIM : 22.61.025478
Program Studi : Kehutanan

Disetujui oleh
Komisi Pembimbing

Dr. Ise Afitah, S.Hut., M.P.
Ketua

Mariaty, S.Hut., M.P.
Anggota

Diketahui oleh

Fakultas Pertanian dan Kehutanan
Dekan,

Program Studi Kehutanan
Ketua,

Dr. Nanang Hanafi, S.Hut., M.P
NIDN. 0018028101

Beni Iskandar, S.Hut., M.Si
NIK. 21.0302.015

Tanggal Sidang: 18 Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Ise Afitah, S. Hut., M.P.
2. Mariaty, S.Hut., M.P.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallah Wa Ta'ala* segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2026 sampai dengan Juli 2026, dengan judul Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam Skema Perhutanan Sosial: studi kasus Koperasi Sawit Buluh Sejahtera di Desa Patai, Kecamatan Cempaga.

Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ise Afitah, S. Hut., M.P. selaku ketua dosen pembimbing
2. Ibu Mariaty, S.Hut., M.P. selaku anggota dosen pembimbing
3. Bapak Ardiyansyah Purnama, S.Hut, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas doa dan kasih sayang-Nya.
5. Almarhumah Ibunda tercinta dan pintu surgaku, ibu Mariani seseorang yang biasa saya sebut mama. Kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak ada dan tidak bisa aku jangkau tapi namamu akan tetap jadi motivasi terkuat sampai detik ini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, semoga Ibu melihat putra kecil ibu dari tempat terbaik disisi-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bakti dan cinta kasih kepada ibu. Andai waktu mengizinkan penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, terimakasih, serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada ibu.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman satu angkatan/satu bimbingan tahun 2022 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UMPR.
8. Untuk teman-teman seperjuangan, Raihan, Aditya Nugraha, Sulaiman, Al Nabil, Rio Rifkiansyah, dan Yogi Alfianur, terima kasih karena telah menemani penulis sejak semester awal hingga sampai pada semester akhir

ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta segala cerita yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu hadir dan bersedia direpotkan dalam berbagai hal, baik dalam urusan perkuliahan maupun di luar itu.

9. Dan terakhir untuk diri saya sendiri, Yovy Hilman. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan, dan air mata terimakasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu.

Semoga Skripsi ini bermanfaat.

Palangka Raya, 18 Juni 2026

Yovy Hilman

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR LAMPIRAN.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Perhutanan Sosial	5
2.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm)	6
2.3 Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).....	7
2.4 Teori Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)	10
2.4.1 Konsep Utama Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)	11
2.4.2 Operasionalisasi Teori CBNRM dalam Penelitian	13
2.5 Penelitian Terdahulu	14
2.6 Analisis SWOT	15
2.7 Kerangka Berpikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Waktu dan Tempat	19
3.2 Bahan dan Alat.....	20
3.3 Prosedur Pelaksanaan	21
3.4 Operasional Variabel.....	29

3.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Dan Subjek Penelitian.....	32
4.1.1 Gambaran Umum Desa Patai	32
4.1.2 Gambaran Umum Koperasi Sawit Buluh Sejahtera	33
4.1.3 Karakteristik Informan Penelitian	37
4.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi & Budaya.....	38
4.2 Pengelolaan HKm oleh Koperasi Sawit Buluh Sejahtera	39
4.2.1 Kelembagaan	39
4.2.2 Pengelolaan kawasan	45
4.2.3 Partisipasi Anggota	50
4.2.4 Pengembangan Usaha	54
4.2.5 Monitoring dan Evaluasi.....	58
4.3 Mengidentifikasi Faktor Internal (Kekuatan & Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang & Ancaman).....	62
4.4 Straregi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	65
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.1.1 Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh Koperasi Sawit Buluh Sejahtera.....	68
5.1.2 Permasalahan, Potensi, dan Peluang Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Prosedur Pelaksanaan.....	22
Tabel 3. 2 Jumlah Responden	25
Tabel 3. 3 Informan Kunci	26
Tabel 3. 4 Operasional Variabel.....	30
Tabel 4. 1 Karakteristik Informan Penelitian	37
Tabel 4. 2 Matriks Wawancara Kelembagaan	43
Tabel 4. 3 Kuesioner Kelembagaan	44
Tabel 4. 4 Matriks Wawancara Pengelolaan Kawasan	47
Tabel 4. 5 Kuesioner Pengelolaan Kawasan	48
Tabel 4. 6 Matriks Wawancara Partisipasi Anggota.....	51
Tabel 4. 7 Kuesioner Partisipasi Anggota.....	52
Tabel 4. 8 Matriks Wawancara Pengembangan Usaha.....	56
Tabel 4. 9 Kuesioner Pengembangan Usaha.....	56
Tabel 4. 10 Matriks Wawancara Monitoring Dan Evaluasi.....	59
Tabel 4. 11 Kuesioner Monitoring Dan Evaluasi.....	60
Tabel 4. 12 Analisis SWOT	64
Tabel 4. 13 Strategi SWOT	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Hubungan CBNRM.....	12
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	17
Gambar 3. 1 Peta Lokasi	19
Gambar 3. 2 Prosedur Pelaksanaan	21
Gambar 4. 1 Peta RKU 2021 – 2030 IUPHKm Koperasi Sawit Buluh Sejatera.....	36
Gambar 4. 2 Kondisi kawasan Areal HKm.....	50
Gambar 4. 3 Kondisi Areal HKm.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Responden.....	74
Lampiran 2 Dokumentasi Pengambilan Data	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Munthe & Astuti, 2024) Hutan sebagai elemen krusial dari sumber daya alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari maupun hayati, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Pendekatan pengelolaan hutan yang dikembangkan selaras dengan paradigma ini adalah melalui pengembangan berbasis masyarakat yang berpusat pada pemanfaatan hutan oleh komunitas di dalam dan sekitarnya (*community based development*). Salah satu wujud dari *community based development* adalah pembangunan hutan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (Munthe & Astuti, 2024).

Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam sektor kehutanan yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan (Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021). Melalui kebijakan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola kawasan hutan melalui lima skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (Toha *et al.*, 2023). Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara upaya pelestarian hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Al Qindy *et al.*, 2024). Hingga tahun 2025, pemerintah telah menerbitkan lebih dari 11 ribu Surat Keputusan Perhutanan Sosial dengan luas akses kelola sekitar 8,4 juta hektare yang melibatkan sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Perhutanan Sosial karena sebagian besar wilayahnya masih berupa kawasan hutan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026, areal indikatif Perhutanan Sosial mencapai sekitar 1.100.742 hektare, sedangkan realisasi izin

yang telah diterbitkan sekitar 270.004 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Perhutanan Sosial di Kalimantan Tengah masih memiliki peluang yang besar, namun keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pengelola, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan (Adeyanju *et al.*, 2021).

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan program Perhutanan Sosial melalui beberapa unit Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program tersebut memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Salah satu pemegang izin HKm di Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah Koperasi Sawit Buluh Sejahtera yang mengelola kawasan seluas ± 818 hektare di Desa Patai berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5904/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018. Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat beberapa pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah memperoleh persetujuan pengelolaan dalam skema Perhutanan Sosial. Koperasi Sawit Buluh Sejahtera memiliki posisi yang cukup khas karena mengelola kawasan HKm seluas ± 818 hektare melalui kelembagaan koperasi yang berfungsi tidak hanya sebagai pemegang izin, tetapi juga sebagai organisasi ekonomi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan, pemberdayaan anggota, dan pengembangan usaha. Karakteristik tersebut membedakan HKm Desa Patai dari sebagian besar kajian HKm yang umumnya berfokus pada pengelolaan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH), sehingga menjadikan HKm Desa Patai relevan untuk dikaji sebagai contoh implementasi Perhutanan Sosial berbasis koperasi.

Dalam penelitian ini istilah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) tetap digunakan karena mengikuti nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5904/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 sebagai dasar legalitas pengelolaan HKm oleh Koperasi Sawit Buluh Sejahtera. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, nomenklatur perizinan Perhutanan Sosial mengalami perubahan menjadi

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS). Oleh karena itu, penggunaan istilah IUPHKm dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian dengan dokumen perizinan yang menjadi objek penelitian, sedangkan pembahasan mengenai regulasi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Melalui izin ini, masyarakat Desa Patai memperoleh hak legal dalam mengelola kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pengelolaan IUPHKm diharapkan mampu menciptakan peningkatan ekonomi melalui usaha hasil hutan bukan kayu, pengembangan agroforestry, serta menjaga kelestarian hutan sebagai pelindung tata air dan sumber keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil telaah berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir, kajian mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm) masih didominasi oleh pembahasan pada aspek tertentu. Beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada evaluasi pengelolaan HKm dan dampaknya terhadap kondisi hutan (Padama *et al.*, 2025). Penelitian lain lebih banyak mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm (Kailola, 2024; Nirawati *et al.*, 2024a). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan Perhutanan Sosial, kajian yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, pengelolaan kawasan, partisipasi anggota, pengembangan usaha, serta monitoring dan evaluasi dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang menggunakan pendekatan *Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)* sebagai dasar analisis pengelolaan HKm oleh koperasi sebagai pemegang IUPHKm juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi keterbatasan tersebut dengan menganalisis pengelolaan HKm oleh Koperasi Sawit Buluh Sejahtera di Desa Patai secara komprehensif menggunakan pendekatan CBNRM sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi Perhutanan Sosial di tingkat tapak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan HKm oleh Koperasi Sawit Buluh Sejahtera berdasarkan aspek kelembagaan, pengelolaan kawasan, partisipasi anggota, pengembangan usaha, serta monitoring dan evaluasi?
2. Apa saja permasalahan, potensi, dan peluang pengembangan HKm di Desa Patai?

1.3 Tujuan

Tujuan pada Penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengelolaan HKm berdasarkan aspek kelembagaan, pengelolaan kawasan, partisipasi anggota, pengembangan usaha, serta monitoring dan evaluasi.
2. Mengidentifikasi Faktor Internal (Kekuatan & Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang & Ancaman) untuk merumuskan Strategi Pengelolaan.

1.4 Manfaat

1. Menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik mengkaji aspek kelembagaan koperasi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan hutan dalam program Perhutanan Sosial.
2. Bagi pengelola HKm, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan HKm secara berkelanjutan.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi Koperasi Sawit Buluh Sejahtera dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
4. Memberi informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana pengelolaan hutan yang baik.
5. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial, khususnya skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).